

**Anarkisme Politik di Aras Lokal**

**(Peran “Bandit” Politik dalam Pilkadaes Di Kabupaten Sumenep)**

**Moh. Ikmal<sup>1</sup>, Mohammad Arifin<sup>2</sup>**

<sup>12</sup> Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP PGRI

Sumenep, Jawa Timur

ikmal@stkipgrisumenep.ac.id; mohammadarifin@ stkipgrisumenep.ac.id

**Abstrak**

*Premanisme politik dalam konteks electoral demokrasi bukanlah suatu anomali. Tindakan memobilisir massa bahkan dengan tindakan intimidasi adalah fenomena umum dalam arena kontestasi politik. Pelaksanaan Pilkadaes di Kabupaten Sumenep yang telah dilakukan secara serentak pada November tahun 2019 lalu tentu menjadi perhatian tersendiri bagi aparat keamanan setempat. Catatan polres kabupaten Sumenep pada tahun 2019 lalu menyebutkan bahwa terdapat 3 kecamatan yang masuk dalam zona rawan konflik diantaranya kecamatan Ganding, Lenteng dan Bluto. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan jaringan kekuasaan kelompok elit Jagoan dalam pemilihan kepala desa di tiga kecamatan Ganding, Lenteng dan Bluto. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan prosedur pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik validasi data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber berupa *person* dan *paper*. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa realitas peran bandit (jagoan) dalam kehidupan politik pada dasarnya susah kita abaikan keberadaannya. Bandit bukanlah sebuah anomali sosial. Ia dianggap referensi, entitas, atau sistem nilai utama dalam politik. Peran mereka tidak hanya pada bidang penguasaan modal yang bersifat ekonomis sebagaimana melainkan sudah merambah pada sector penguasaan struktural melalui proses politik dan demokrasi. Bertemuinya realitas sosio-kultural masyarakat dengan struktur kekuasaan negara inilah yang menjadikan unsur-unsur premanisme semakin akomodatif dan memiliki elastisitas atau kelenturan sehingga dapat hadir di berbagai posisi kultural dan structural masyarakat.*

**Kata kunci:** *Anarkisme Politik; Bandit; Pilkadaes;*

**Abstract**

*Political thuggery in the context of electoral democracy is not an anomaly. The act of mobilizing the masses even with acts of intimidation is a common phenomenon in the arena of political contestation. The implementation of Pilkadaes in Sumenep Regency which was carried out simultaneously in November 2019 is certainly a special concern for the local security apparatus. The records of the Sumenep district police in 2019 stated that there were 3 sub-districts that were in conflict-prone*

*zones including Ganding, Lenteng and Bluto districts. Therefore, this study aims to describe the role and power network of the Jagoan elite in village head elections in the three sub-districts of Ganding, Lenteng and Bluto. This research uses descriptive qualitative research with data collection procedures in the form of interviews, observation and documentation, the data validation technique used is the source triangulation technique in the form of person and paper. The results of the above research indicate that the reality of the role of bandits (jagoan) in political life is basically difficult for us to ignore their existence. Bandits are not a social anomaly. It is considered the primary reference, entity or value system in politics. Their role is not only in the area of control of economic capital as well as in the structural control sector through political and democratic processes. The meeting of the socio-cultural reality of society with the state power structure is what makes thuggery elements more accommodating and have elasticity or flexibility so that they can be present in various cultural and structural positions of society.*

**Keywords:** *Political Anarchism; Bandits; Pilkades;*

## **Pendahuluan**

Desa secara formal merupakan wilayah administratif pemerintahan terkecil dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Tidak hanya pada aspek administratif, keberadaan desa sebagai institusi formal pemerintahan lokal memiliki peran penting terutama dalam mengawal demokratisasi lokal serta berperan penting juga dalam peningkatan kualitas kesejahteraan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik serta memperkuat daya saing desa. Penataan desa berdasarkan prinsip *good governance* tersebut adalah merupakan wujud penting dalam rangka mengawal proses demokratisasi dalam bingkai otonomi daerah. Dalam konteks pelaksanaan demokratisasi desa, hadirnya pemilihan kepala desa (*pilkades*) merupakan aspek penting dalam menakar kualitas kehidupan masyarakat yang demokratis, hal ini karena *pilkades* konon dianggap sebagai arena demokrasi yang paling nyata di desa. Dalam *pilkades* terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara

langsung dengan prinsip *one man one vote*.

Namun disadari atau tidak meski demokratisasi membuka ruang keterlibatan *civil society*, gejala demokratisasi disisi lain juga menyebabkan banyaknya fragmentasi sosial dalam masyarakat dan partai politik adalah merupakan bentuk gejala yang kongkrit untuk menyebut fenomena tersebut sebagai implikasi dalam penerapan sistem demokrasi perwakilan. Konsekuensi diatas merupakan keniscayaan dibalik prinsip-prinsip penerapan demokrasi itu sendiri yang memberikan ruang jaminan pemenuhan hak - hak sipil dan hak politik secara luas sebagaimana dijamin dalam konstitusi RI yang tentu konsekuensi ini juga semakin membuka ruang partisipasi publik yang luas dalam setiap pemilu termasuk dalam hal ini *pilkades*. Namun pada praktek politik praktis, fenomena partisipasi publik dalam konteks ini telah mengalami pergeseran orientasi dan di koersi ke dalam wujud partisipasi politik yang sifatnya transaksional. Partisipasi publik seharusnya dibangun atas

dasar orientasi normatif dalam rangka memperkuat tujuan negara bukan untuk kelompok atau individu.

Sepanjang sejarah transisi politik demokrasi di Indonesia, praktek politik transaksional para elit sudah menjadi pemandangan umum dalam lingkaran kekuasaan Negara. Politik patronase di Indonesia begitu sangat kental dan mengakar hingga ke daerah bahkan ke desa. Dalam prakteknya kekuasaan patrimonialisme ini telah lama berlangsung sejak orde lama hingga reformasi saat ini. Kekuasaan ini dipertahankan dalam pola-pola tertentu yang sejatinya adalah merupakan bagian dari dinamika demokratisasi yang berkembang di Indonesia.

Patrimonialisme politik adalah merupakan gambaran praktek kekuasaan pemerintahan yang diselenggarakan dan dipertahankan dengan cara bagaimana kekuasaan tersebut mampu mempertahankan kesetiaan elit politik yang ada. Dalam pemerintahan patrimonial ini, politik merupakan alat perjuangan elit politik, kelompok atau klien untuk mendapatkan balas jasa dari

penguasa. Penguasa dapat mempertahankan kekuasaannya dengan mempertahankan keseimbangan kelompok - kelompok atau elit yang bersaing. Pada masa kepemimpinan orde lama, kekuasaan Soekarno sebagai patron tunggal dipertahankan melalui strategi politik pecah belah (*divide et impera*) terhadap kelompok elit tingkat atas agar tidak menjadi satu kelompok. Kekuasaan patrimonial inipun terus berlangsung dan dipelihara pula oleh rezim pemerintahan orde baru melalui upaya pemerintah membangun hubungan politik dengan para pengusaha, hubungan pemerintah dengan pengusaha inilah merupakan contoh hubungan patrimonialisme politik yang hingga kini masih bercokol di negeri ini melalui kebijakan liberalisasi diberbagai sektor terutama liberalisasi ekonominya.

Fenomena kekuasaan patrimonial diatas memberi gambaran nyata bahwa politik patronase juga bisa terjadi pada skala yang lebih kecil yaitu pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa sebagai bagian dari proses politik lokal

masyarakat yang sejatinya jauh dari hiruk pikuk dunia parpol dan dianggap paling demokratis berdasarkan prinsip one man one vote semestinya menjadi arena demokrasi yang sehat juga tidak jauh dari praktek politik semacam ini. Namun ekspektasi demokratisasi lokal yang sehat dalam prakteknya justru banyak diwarnai dengan beragam fenomena politik transaksional didalamnya. Salah satu isu utama dalam proses transisi politik ini adalah menguatnya penggunaan politik uang (*money politic*), fenomena peran Jagoan (bandit), dan hubungan kekuasaan patron-klien (*patron client relationship*) turut mewarnai proses transisi politik demokrasi di desa.

Politik uang (*money politics*) merupakan salah satu fenomena dalam sistem politik yang dapat mendeligitimasi mekanisme elektoral di dalam demokrasi. Dalam demokrasi politik yang belum matang, seperti di Indonesia, politik uang dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan. Partisipasi politik masyarakat dengan demikian tidak didasarkan pada *political*

*literacy* yang mereka miliki, akan tetapi dikungkung oleh keharusan memberikan preferensi kepada kontestan yang memberikan uang dengan jumlah terbesar. Dengan praktek uang seperti itu, politik akan bergeser dari mekanisme mewujudkan kepentingan bersama (*common good*) ke proyek bisnis. Hal tersebut juga menjadikan adanya lingkaran tiada putus antara politik korupsi dan korupsi politik.

Tak cukup praktek penggunaan politik uang, pada level lokal seperti pemilihan kepala desa, munculnya aktor-aktor yang memiliki kemampuan secara fisik juga menjadi leading sector terutama dalam memobilisasi dukungan politik baik dilakukan secara intimidatif maupun dengan cara lainnya. Elit tersebut tidak hanya memiliki pengaruh sosial semata melainkan juga memiliki peran besar dalam dinamika politik lokal setempat. Dalam perspektif yang lebih luas, kekuasaan (pengaruh) tidak hanya sekedar didapatkan melalui penguasaan modal yang bersifat ekonomis maupun merebut kekuasaan struktural melalui proses

politik dan demokrasi prosedural. Kekuasaan juga bisa diperoleh melalui pembentukan persepsi atas situasi (*situation perception*) sehingga tindakan demikian mampu menguasai alam pikiran massa. Disanalah ada sebuah proses informasi yang didistribusikan dari pihak satu ke pihak lainnya yang memiliki posisi lemah dari sudut pandang kekuasaan.

Dalam pemikiran Foucault menyatakan bahwa siapapun yang memiliki pengetahuan maka ia juga akan menguasai kehidupan (Foucault. 2002).

Menurut Foucault kekuasaan bukanlah suatu milik, tapi strategi. Artinya mereka yang memiliki kekuasaan dan pengetahuan dapat pula membangkitkan relasi kekuasaan. Kekuasaan bukanlah kepemilikan tunggal ditangan satu pihak, sehingga seseorang atau sekelompok orang bisa melakukan kekuasaan sendiri terhadap orang lain (dibawahnya) secara total. Kekuasaan dapat digunakan oleh siapa saja, sebagaimana layaknya sistem jaringan pipa kapiler. Dengan demikian, tidak hanya satu individu

yang memutar kekuasaan, karena individu - individu yang lain (kelompok individu) juga berada dalam posisi yang serentak menjalankan dan menciptakan kekuasaannya.

Berdasarkan konteks diatas, maka pengaruh (penguasaan) individu atau kelompok kepada individu atau kelompok yang lain dapat terjadi melalui pembentukan persepsi atas situasi. Jagoan merupakan struktur kelas sosial yang dipersepsi oleh masyarakat memiliki kemampuan secara fisik bahkan dibekali oleh kemampuan seni bela diri serta juga kekuatan supranatural yang hampir bagi sebagian masyarakat ditakuti, disegani bahkan dihormati keberadaannya. Keberadaan mereka tidak hanya sebagai kelompok pengacau bahkan dalam kondisi tertentu tenaga mereka dibutuhkan sebagai kelompok pengaman. Dalam kultur masyarakat Madura, fenomena jagoan hampir banyak ditemukan di wilayah Madura. Penyebutan kawan jagoan di beberapa tempatpun berbeda-beda. Jika blater adalah istilah kelompok jagoan yang populer di Madura

bagian barat (Bangkalan dan Sampang), maka di Madura bagian timur (Pamekasan dan Sumenep) lebih populer dengan sebutan bajingan.

Keberadaan jagoan-jagoan di Madura tersebut berawal dari gerakan resistensi rakyat terhadap kekuasaan Kolonial dan penguasa lokal yang sering menimbulkan kesengsaran di Madura. Tulisan Rozaki melalui bukunya *Menabur Kharisma Menuai Kuasa; Kiprah Kyai dan Jagoan Sebagai Rezim Kembar di Madura* telah menggambarkan bagaimana fenomena jagoan secara jelas pada masyarakat Madura, bahkan ia juga menjelaskan sisi lain dibalik seorang Bupati Fuad Imron yang tidak hanya disebut sebagai seorang “Kyai” tapi ia juga merupakan seorang “Blater” (Kyai Blater) (Rozaki; 2003).

Tidak dapat kita pungkiri bahwa ditengah proses transisi politik demokrasi dan kepemimpinan politik yang masih belum dewasa di Indonesia, para jagoan ini seringkali memainkan perannya sebagai kelas sosial yang memiliki pengaruh penting dalam

proses transisi politik lokal di beberapa tempat. Studi yang dilakukan oleh Mahsun dalam satu analisisnya menyebutkan bahwa kemenangan Herman Deru dalam pilkada OKU timur tahun 2010 tidak lepas dari keterlibatan orang kuat lokal (bosisme), fenomena sosial semacam ini dibentuk karena liberalisasi politik dan pemilukada langsung telah membuka kran baru bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkompetisi, Kompetisi antar elit dan tawar menawar adalah hal yang wajar dalam proses demokrasi, disinilah keterlibatan orang kuat (bosisme) hadir turut mewarnai proses demokrasi oligarkhi ditingkat lokal.

Fenomena diatas memberikan gambaran nyata bahwa demokratisasi satu sisi telah menciptakan praktik monopoli kekuasaan dalam masyarakat. Penguasaan kelompok elit atas sumber-sumber produksi dalam konstelasi politik ini berpotensi membuka ruang kompetisi yang bebas. Dalam pemilihan kepala desa pelibatan sekelompok elit-elit berpengaruh seperti kalangan jagoan dapat terjadi

dalam konteks kepentingan dan hubungan yang sifatnya timbal balik di dalamnya. Artinya Kepala desa pada umumnya mendapatkan dukungan secara politis atas imbalan yang diberikan para jagoan kepada desa.

Di sadari atau tidak, pada skala politik yang lebih luas lagi semisal negara, peran “para pengaman” juga merupakan aspek penting guna menjaga stabilitas politik nasional dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Untuk itu keberadaan “militer” atau “Jagoan” dalam istilah yang lain dalam fenomena politik desa tentu tidak dipungkiri dilakukan sebagai bentuk upaya menjaga stabilitas politik yang ada. Namun meski demikian keberadaan para jagoan bergerak tanpa prosedur hukum yang berlaku di desa. Ia berkembang pesat dan menyebar melakukan “rekonsiliasi politik” guna melakukan mobilisasi massa dengan tujuan dan maksud untuk kepentingan kelompok mereka.

Berdasarkan fenomena diatas kemudian tergambar bagaimana pola hubungan penguasa dengan para

kawanan jagoan sebagai sebuah fenomena hubungan patron-klien (patron-client relationship). Hubungan patron-klien adalah sebagai bentuk interaksi antar kelas-kelas sosial dalam masyarakat Madura. Hubungan patron-klien adalah merupakan pola interaksi antara patron dan klien. Istilah patron sendiri berasal bahasa Latin “*patronus*” atau “*pater*” yang berarti ayah (father). Karenanya penyebutan istilah patron tersebut merupakan istilah untuk menyebut pihak yang memberikan perlindungan dan manfaat serta mendanai dan mendukung terhadap kegiatan beberapa orang. Sementara klien juga berasal dari bahasa Latin “*cliens*” yang berarti pengikut.

Dalam kajian ilmu sosial patron merupakan konsep interaksi kelas-kelas sosial (sosial strata) dan penguasaan sumber ekonomi. Konsepsi patron senantiasa mengikuti konsep klien karena kedua konsepsi sosial tersebut membentuk hubungan yang khusus (*clientelism*), yaitu satu bentuk hubungan organisasi sosial dimana patron sebagai pihak yang berkuasa dan



kaya memberikan pekerjaan, perlindungan, infrastruktur dan berbagai manfaat lainnya kepada klien yang tidak berdaya dan miskin. Imbalannya klien memberikan berbagai bentuk kesetiaan, pelayanan dan bahkan dukungan politik kepada patron.

Menurut konsep diatas hubungan patron-klien merupakan bentuk hubungan pertukaran khusus. Persekutuan tersebut dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memang merasa perlu untuk memiliki sekutu yang mempunyai status, kekayaan dan kekuatan lebih tinggi (superior) atau lebih rendah (inferior) daripada dirinya. Dalam perspektif komunikasi politik, interaksi sosial dalam masyarakat akan sendirinya menciptakan polarisasi sosial akibat kekuasaannya. Oleh karenanya dalam konteks pemilihan kepala desa, kekuasaan pemerintahan patrimonial ini merupakan wujud polarisasi sosial dalam rezim pemerintahan tradisional yang diperhankan dan dipelihara melalui pola-pola tertentu. Dalam pola pemerintahan patrimonial, kekuasaan

penguasa tergantung pada kecakapan untuk mempertahankan kesetiaan elit-elit atau kelompok yang umumnya memiliki *resources* (status sosial atau bahkan kekuatan fisik) yang signifikan dalam masyarakat. *Resources* dalam perspektif patrimonialisme politik adalah merupakan wujud imbalan klien pada patron baik berupa bantuan tenaga, pelayanan maupun dukungan secara politik.

### **Metode**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan secara intensif dan terperinci terhadap suatu organisme, lembaga, atau gejala tertentu melalui suatu pengamatan atau analisis untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang, gejala atau perilaku yang diamati (Moleong, 2002).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan naturalistik, untuk mengungkap ontologi paradigma

penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti bersifat aktif dalam melakukan interaksi dengan subjek penelitian dalam situasi apa adanya tanpa adanya rekayasa, sehingga data diperoleh dari fenomenanya yang bersifat asli dan natural (Sulistyo, 2006).

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, mengklasifikasi sumber data menjadi tiga jenis; a) *Person*, yaitu sumber data berupa orang. b) *Place*, yaitu sumber data berupa tempat, dan c) *paper*, yaitu sumber data berupa symbol. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis person dan paper. Subjek penelitian berupa person adalah kelompok elit muda dan aparat desa setempat. Sementara subjek penelitian berupa paper adalah dokumen-dokumen tertulis baik berupa perundang-undangan ataupun bahan pustaka lainnya yang memiliki relevansi dengan data penelitian (Arikunto. 2002)

Penentuan subjek penelitian berupa person dilakukan dengan teknik purposif. Dengan teknik ini,

ditetapkan kriteria-kriteria sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu penduduk tetap di desa tempat penelitian dilaksanakan. Sedangkan subjek berupa paper digunakan sebagai sumber data-data sekunder sesuai dengan tujuan penelitian. Sementara untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh secara langsung (data primer), selebihnya adalah data tambahan berupa literatur, dokumen dan lain-lain. Beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Observasi; metode observasi yaitu “penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap obyek. Metode ini dimaksudkan sebagai pengumpul data dengan mengadakan pengamatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti. Berdasarkan sejumlah aspek, Patton mencoba mengklasifikan 5 teknik pengamatan (observasi) dalam penelitian kualitatif yaitu a) berdasarkan tingkat peran serta peneliti : peran serta penuh, peran serta terbatas, dan tanpa berperan serta (peneliti bertindak sebagai

penonton); b) berdasarkan tingkat keterbukaan peran peneliti : keterbukaan penuh (semua subyek penelitian mengenal peneliti dan mengetahui kegiatan pengamatannya), keterbukaan terbatas (hanya sebagian subyek penelitian mengenal peneliti dan mengetahui kegiatan pengamatannya), tertutup penuh (subyek penelitian tidak mengenal peneliti dan tidak tahu menahu tentang kegiatan pengamatannya); c) berdasarkan tingkat keterbukaan tujuan penelitian : terbuka penuh (dijelaskan seluruhnya kepada subyek penelitian), keterbukaan terbatas (dijelaskan sebagian kepada sebagian subyek penelitian), tertutup penuh (tanpa penjelasan kepada subyek penelitian), dan pemalsuan (memberikan penjelasan palsu atau bohong kepada subyek peneliti); d) berdasarkan tingkat kedalaman dan keluasan atau jangka waktu pengamatan : jangka pendek (pengamatan tunggal dalam waktu misalnya 2 jam), dan jangka panjang (pengamatan berganda dalam waktu lama, misalnya bulanan atau tahunan); e) berdasarkan himpunan

pengamatan : himpunan sempit (terhimpun pada suatu unsur saja), dan himpunan luas (tinjauan holistik yang mencakup semua unsur). 2) Wawancara mendalam, teknik wawancara merupakan bentuk percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) yaitu teknik wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada panduan wawancara. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan petunjuk umum wawancara (panduan wawancara) yang membantu peneliti agar focus pada permasalahan yang diteliti. Panduan wawancara tersebut tidak sepenuhnya mengikat proses wawancara secara kaku, akan tetapi wawancara dapat berkembang sesuai dengan situasi masyarakat dan khususnya informan. Meski demikian, peneliti tetap berupaya

secara jeli agar wawancara dapat menjawab tujuan penelitian. 3) Dokumentasi, dokumentasi adalah pengkajian atas berbagai dokumen resmi baik yang bersifat internal maupun eksternal. Bersifat internal dalam artian pengkajian langsung atas dokumen, misal data monografis, sedangkan yang bersifat eksternal berupa sumber-sumber yang mendukung pengkajian atas dokumen, seperti arsip berita (Patton. 1990).

Validitas penelitian menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi terdapat empat macam yaitu pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, teori. Berdasarkan jenis tersebut teknik triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber data, yang berarti peneliti memanfaatkan sumber dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

## **Pembahasan**

### **Transformasi Elit Lokal dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat desa di Kabupaten Sumenep**

Perubahan struktur kekuasaan dalam suatu Negara selalu membawa implikasi penting terhadap perubahan sistem politik, budaya dan sistem sosial dalam masyarakat. Tumbangnya kekuasaan sentralistik rezim orde baru telah berdampak serius terhadap perkembangan demokratisasi. Konsekuensi perubahan tersebut telah mendorong perluasan distribusi kekuasaan dari pusat hingga ke daerah (desentralisasi). Fenomena desentralisasi dalam berbagai aspek kehidupan turut membuka ruang public yang luas. Eforia demokrasi inipun ditandai dengan perubahan system pemilu kita yang bersifat langsung. Tak terkecuali dalam pemilihan kepala desa melalui mekanisme *one man one vote* adalah wujud nyata partisipasi public

warganegara yang telah mendapat jaminan konstitusional pasca reformasi.

Lalu bagaimana praktek demokrasi local berkembang tentu masing-masing daerah beragantung pada sumber nilai yang berbeda. Dinamika sosial politik Madura tentu berbeda dengan daerah jawa pada umumnya. Pada aspek religiusitas, Madura memiliki rekam sejarah yang cukup kental dengan symbol-simbol agama. Kehidupan masyarakat yang kental dengan tradisi spiritual ini turut mewarnai baik pada kehidupan sosial masyarakat sehari-hari maupun pada bidang kehidupan sosial lainnya.

Jumlah penganut agama islam diatas tentu tidak sebanyak sebagaimana pada daerah perkotaan yang jumlah penduduknya lebih padat jika dibandingkan dengan daerah pedesaan. Karakter masyarakat komunal pada masyarakat desa menyebabkan kecenderungan tradisi ritual keagamaan masyarakatnya hampir seragam. Kesamaan ini barangkali lebih disebabkan oleh sedikitnya berbagai kelompok-kelompok

keagamaan yang ada. Sementara pada masyarakat perkotaan dengan karakter heterogenitas didalamnya justru semakin berkembang luas kelompok-kelompok keagamaan didalamnya.

Realitas kehidupan social keagamaan masyarakat desa dan kota diatas tentu lebih disebabkan karena banyaknya lembaga-lembaga pendidikan non formal (pesantren) yang hampir tersebar ke berbagai pelosok-pelosok. Pesantren merupakan warisan tertua lembaga pendidikan non formal di Indonesia yang ada sejak masuknya agama islam di Indonesia ini. Seorang kyai merupakan toko elit yang memiliki pengaruh sosial penting dalam perubahan masyarakat Madura. Menguatnya tradisi kultural kaum santri pada masyarakat Madura telah menempatkan posisi kyai sebagai elit tunggal yang tidak hanya sebagai elit kultural namun mampu mengubah dinamika kultur politik suatu daerah.

Tentunya orde reformasi membawa angin segar terhadap kondisi sosial politik masyarakat termasuk juga di Madura. Kiprah kyai pun semakin meluas kedalam

berbagai aspek kehidupan sosial lainnya. Elit kyai di Madura memperluas struktur kekuasaannya tidak hanya sekedar sebagai elit kultural yang membawa misi ketuhanan melainkan juga sebagai elit structural dalam kelembagaan institusi politik yang ada di masyarakat. Tidak sedikit para elit kyai terjun langsung ke dalam aktivitas politik praktis. Keinginan masyarakat Madura terhadap dualisme kepemimpinan kyai berangkat dari keyakinan bahwa sosok kyai memiliki kapasitas dan integritas personal yang mampu menjawab krisis kebangsaan pasca transisi politik pasca rezim orde baru. Sejumlah informan menuturkan bahwa posisi dan keberadaan figure kyai dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik masih menjadi panutan bagi masyarakat (Sidqi, wawancara 25 Juni 2020).

Modalitas yang dimiliki sosok kyai tersebut tentu penting dalam rangka memperkuat gerakan politik kekuasaan. Namun meski sosok kyai sebagai elit berpengaruh di Madura, pasca berubahnya struktur kekuasaan di era orde baru,

orde reformasi justru memperluas distribusi kekuasaan Negara. Konsekuensi perubahan tersebut tentu semakin membuka luas partisipasi dan kompetisi antar actor. Kompetisi tersebut ditandai semakin berkembangnya kalangan elit-elit berpengaruh disamping elit kyai diatas yaitu Juragan, Blater, Klebun, Jagoan Cendekiawan, Politisi Lokal, Birokrat dan sebagainya,

Keberadaan elit-elit diatas tentu memiliki dimensi kekuasaan yang berbeda, jika para juragan memiliki otoritas kekuasaannya pada sector ekonomi maka lain halnya dengan kalangan jagoan, blater maupun bajingan yang otoritas kekuasaannya diperoleh melalui tindakan intimidatif dan respresif kepada masyarakat. Meski kultur premanisme, banditisme dan jagoanisme berseberangan dengan prinsip moral dan nilai demokrasi namun dalam realitas politik lokal fenomena tersebut sangat usah kita abaikan fakta-fakta perilaku banditisme didalamnya. Kultur demikian tentu melekat pada masyarakat yang masih berfikir tradisional dimana kekuasaan dalam

masyarakat masih belum terdistribusi dengan jelas dan merata juga terjadi pada masyarakat yang memiliki literasi politik yang rendah.

Berdasarkan kajian antropologis, kultur premanisme masyarakat Madura barangkali bisa kita lihat kuatnya budaya patriarki. Dalam pandangan orang Madura, setiap anak laki-laki di Madura sudah dibiasakan untuk berani, kuat, tidak mencla-mencle dan tegas. Anak laki-laki Madura yang penakut dianggap tidak punya kenjantanan. Istilah *kettok pala'en* (potong alat kelaminmu) dan *ngangguy sampèr* (memakain rok) seringkali diucapkan kepada lelaki Madura yang penakut. Simbolisasi kultural bagi laki-laki yang penakut ini tentu bisa dimaknai sebagai bentuk symbol budaya patriarki warga Madura yang tentu telah mereproduksi alam bawah masyarakat untuk menemukan identitas diri yang sebenarnya.

Jika dilihat lebih jauh memang ada semacam nilai dan norma sosial bahwa kehormatan dan harga diri lelaki Madura terletak pada keberaniannya (*angko, bengalan*). Bagi masyarakat Madura,

anak laki-laki yang ketahuan menangis akan dimarahi orang tuanya. Karena menangis adalah simbol dari perempuan, dan seorang laki-laki harus bersikap maskulin dan jantan.

Pada bidang kehidupan interaksi masyarakat, kultur kekerabatan masyarakat Madura juga dikenal kuat. Sesama kerabat harus rukun. Saling tolong menolong. Meskipun terjadi konflik diantara saudaranya, hendaknya diselesaikan secara baik-baik tanpa harus memutuskan tali kekerabatan. Jika sampai terputus tali kekerabatannya, maka mereka akan dianggap orang *nespa* dan *kasta dibudina* (menderita dan menyesal pada akhirnya karena tak punya saudara). Tuntutan mempererat tali hubungan kekerabatan ini terlihat dari pribahasa Madura yang berbunyi *ja'ngakan tolang taretan dibi'* (jangan mendzalimi saudara sendiri).

Hubungan pertemanan juga dapat meningkat menjadi hubungan persaudaraan, ketika diantara teman telah terjalin ikatan batin dan emosional yang kuat. Sebagaimana prinsip kanca daddi taretan. Hal yang

diutamakan dalam pertemanan adalah kesungguhan, kejujuran, kasih sayang dan pengertian. Bukanlah semata-mata kepentingan sesaat belaka. Seperti yang diungkap dalam pemeo masyarakat Madura “*mon akanca ben ataretan je’ tong-etongan ma’le akor salanjengnga* (dalam persahabatan janganlah mengedepankan kalkulasi ekonomis).

Realitas kekerabatan masyarakat dan keberadaan elit lokal di Madura tentu tidak bisa kita abaikan fakta-fakta tersebut bahwa kehidupan elit local pun memiliki kultur kekerabatan yang kuat satu sama lain. Kultur tersebut paling tidak dipengaruhi oleh factor ekologis dan sosologis. Factor ekologis Madura sebagai kawasan yang tandus dan gersang mendorong mobilitas penduduk yang tinggi dan tersebar diberbagai daerah-daerah perkotaan. Meski sebagai warga perantau kultur kekerabatan etnis Madura terwujud ke dalam sebuah identitas sosial perkampungan-perkampungan Madura. Ikatan-ikatan sosial tersebut terus terpelihara dengan baik dan

berfungsi menjaga solidaritas sosial para etnis Madura yang ada.

Namun realitas kultural warga Madura yang mencerminkan solidaritas sosial yang tinggi diatas bukan berarti menjamin kawasan Madura terbebas dari perilaku kriminalitas. Kondisi ekologis alam Madura yang tidak menguntungkan secara ekonomis juga telah turut serta mereproduksi system ikatan-ikatan sosial lain didalamnya. Kriminalitas identik dengan aktivitas kelompok-kelompok preman, bajingan, jawara, blater dan jagoan. Premanisme dalam realitas struktur sosial masyarakat selalu hadir dan menguasai hampir pada masyarakat terutama pada masyarakat pedesaan.

Struktur ekologis pedesaan yang tidak menguntungkan secara ekonomis diatas juga turut memicu perubahan perilaku masyarakat didalamnya. Karena itu migrasi merupakan salah satu upaya sebagian warga Madura untuk menggantungkan nasib di daerah perantauan. Meski sebagai kaum migran Madura, tidak semua kaum migran Madura berhasil dan sukses didaerah perantauan. Beberapa



warga migran yang gagal pada akhirnya pulang ke kampung halaman mereka dan kembali menjadi petani pada umumnya.

Bagi yang berhasil, meski mengalami perubahan status sosial dalam masyarakat, namun dengan perubahan status sosial masyarakat juga tidak menutup akses perilaku kriminalitas sosial di dalamnya. Di beberapa kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, pertumbuhan ekonomi suatu daerah selalu diikuti dengan peningkatan jumlah angka kriminalitas sosial di dalamnya. Realitas ini tentu disebabkan baik factor structural dan kultural, factor structural artinya bahwa struktur kekuasaan Negara melalui kebijakan politik pemerintah tidak mampu memberikan ruang akses yang luas dan merata bagi kepentingan public, gejala semacam ini diakibatkan karena tidak adanya alokasi dan distribusi sumber-sumber nilai yang merata ke tengah-tengah masyarakat.

Akibatnya gejala structural diatas tentu bisa berpotensi besar terhadap perubahan system sosial dalam masyarakat. Fenomena kriminalitas di beberapa tempat baik

perkotaan lebih-lebih di pedesaan sebagai realitas sosial tentu dapat disebabkan karena tidak adanya pelembagaan institusi formal yang kredibel dalam masyarakat, jadi tindakan pembunuhan dan beberapa perilaku criminal lainnya juga dapat dipandang sebagai perilaku sosial movement masyarakat sipil terhadap institusi-institusi politik yang ada.

Dengan demikian keberadaan elit-elit lokal disamping elit kyai seperti kelompok jagoan diatas tentu tidak dapat kita abaikan fakta-fakta keberadaan mereka. Jika elit kyai sebagai elit informal yang dekat dengan misi ketuhanan maka elit jagoan selalu identic dengan perilaku kekerasan yang membawa misi keamanan melalui ancaman-ancaman. Realitas kepemimpinan elit-elit lokal tersebut baik secara kultural berada pada dimensi kekuasaan yang berbeda namun kita tidak bisa mengesampingkan keberadaan mereka dalam realitas sosial politik terutama dalam konteks dinamika politik lokal pemilihan kepala desa (pilkades).

### **Peran dan Jaringan Kekuasaan Kelompok Elit Jagoan Dalam Pemilihan Kepala Desa 2019 di Kabupaten Sumenep**

Sejarah merupakan riwayat hidup para pembesar, begitulah realitas sejarah perjalanan para pembesar ditulis dan dikenang oleh manusia. Kontribusi karya pemikirannya mampu melampaui lintas masa dan memiliki pengaruh besar bagi generasi selanjutnya. Tapi siapakah “orang besar” alias “wong gede” untuk membedakan dengan “wong cilik” alias rakyat biasa tersebut?.

Kata elite menurut Bottomore digunakan pada abad ketujuh belas untuk menggambarkan barang-barang dengan kualitas yang sempurna, penggunaan kata itu kemudian diperluas untuk merujuk kelompok-kelompok sosial yang unggul, misalnya unit-unit militer kelas satu atau tingkatan bangsawan yang tinggi. Terminologi elite sebagaimana yang dijelaskan Haryanto “senantiasa menunjuk pada seseorang atau kelompok yang mempunyai keunggulan tertentu, dimana dengan keunggulan yang

melekat pada dirinya yang bersangkutan dapat menjalankan peran yang berpengaruh pada cabang kehidupan tertentu” (Haryanto, 2005).

Struktur dan relasi social kehidupan dan keberadaan para elit senantiasa menjadi penentu terhadap perubahan social. Tumbangnya rezim Orde Baru pada bulan Mei 1998 juga tidak bias dilepaskan dari keberadaan peran elit masyarakat dan sekaligus menjadi penanda perubahan dan era reformasi yang diperjuangkan dapat memberikan peluang besar bagi kemajuan demokratisasi di Indonesia. Di era demokratisasi dan desentralisasi dimana peluang kontestasi dan kompetisi antar elit politik lokal maupun masyarakat semakin terbuka secara luas. Hal ini tidak terjadi pada saat rezim Orde Baru berkuasa, dimana peran Negara sedemikian dominan, kemunculan dan peran elit politik lokal tidak bebas dari campur tangan pemerintah. Pada era otoritarian Orde Baru elit politik lokal lebih sering memainkan peran untuk mewujudkan kepentingan pemerintah pusat ketimbang

merealisasikan kepentingan dan kebutuhan daerah. Elit politik lokal cenderung melakukan peran sebagai perpanjangan tangan negara, dalam hal ini pemerintah pusat, untuk mengkooptasi masyarakat (Antlov, 1994).

Menguatnya kerangka otonomi daerah dimana prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokratisasi dan desentralisasi juga ikut mendorong fenomena pemilihan kepala desa di beberapa daerah tumbuh menjadi semakin dinamis dimana polarisasi partisipasi politik masyarakat mulai terbentuk melalui berbagai kelompok - kelompok penekan maupun hadirnya tokoh elit local (*local strongman*) meski pada hakekatnya dalam fenomena pilkades ini tidak kita temukan keberadaan partai politik pengusung. Fenomena demikian menarik untuk mencermati keberadaan dan peran elit politik lokal.

Transisi demokrasi pada tahun 1999 makin memperlebar kemungkinan akumulasi kekuasaan *local strongmen* oleh mafia, jaringan

marga di lokalitas seluruh Nusantara. Menurut Sidel kondisi-kondisi ini kurang lebih sama dengan di Philipina dan Thailand yang diidentifikasi Sidel sebagai berikut : 1). Kompetisi politik yang terbuka di level lokal telah membuka peluang akumulasi kekuasaan di tangan mafia lokal, jaringan, dan klan, 2). Kasus Sumatera Utara : (a). Aktor politik penting berasal dari kalangan pengusaha kecil dan menengah yang hidupnya tergantung dari proyek pemerintah; (b). politisi profesional yang memiliki jaringan dengan partai politik orde baru; (c). Aktifis organisasi mahasiswa/pemuda yg selama ini menjadi supplier birokrasi Orde baru; (d). Dari 22 bupati/walikota, 6 adalah pebisnis – berupaya melakukan kontrol atas *state apparatus*; 3). Kasus Aceh : (a). Mafia kayu lokal yang memiliki pengaruh kuat di birokrasi dan lembaga perwakilan; (b). Melalui jaringan pengaruh ini, mafia kayu memastikan pejabat lokal yang terpilih tidak mengancam bisnis mereka; (c). Jaringan yang terbentuk meliputi; bupati, polres & kodim, pejabat lokal dan imam; 4). Kasus

Medan : (a). Penguasaan DPRD oleh kelompok preman yang berkompetisi (b). mereka memiliki jaringan dengan pensiunan tentara dan polisi; (c). Walikota adalah pebisnis yang menang terutama melalui pembelian suara dan ancaman (Sidel. 1999)

Realitas diatas tidak jauh berbeda dengan wilayah Madura, keberadaan kelompok jagoan sebagai elit kultural di Madura disamping elit kyai memiliki peran masing-masing. konstruksi social tentang kelompok jagoan sangat terkait pula dengan konstruksi jagoanisme di dalam masyarakat sementara elit kyai selalu terkait dengan elit agama. Jagoan adalah sosok orang kuat, baik secara fisik maupun magis dan biasanya dikenal memiliki ilmu kebal, pencak silat atau ilmu bela diri. Seorang jagoan dapat dengan mudah mengumpulkan pengikut, anak buah dengan jumlah yang cukup besar. Meskipun besaran jumlah pengikutnya sangat tergantung atas kedigdayaan ilmu (kekerasan) yang dikuasainya.

Sosok jago atau jagoan yang sudah malang melintang di dunia kekerasan, dan namanya sudah

sangat tersohor karena ilmu kesaktiannya akan menambah kharisma dan kekuatannya untuk mempengaruhi banyak orang. Kondisi ini mengantarkan sosok jagoan selalu memiliki peran signifikan dalam proses perubahan sosial masyarakat, tidak hanya pada aspek sosial melainkan juga pada aspek politik.

Potret dinamika elit jagoan pedesaan dalam beberapa peristiwa social dalam masyarakat seringkali dilibatkan oleh elit-elit structural (klebun) setempat terutama dalam mengatasi maraknya aksi pencurian dan sebagainya. Sejumlah informan menjelaskan kepada peneliti bahwa aktivitas pencurian di pedesaan terkait dengan perilaku kelompok jaringan jagoan desa. Oleh karena itu pelibatan para jagoan desa tersebut dapat membantu mendeteksi pelaku tersebut dengan mudah (Harun, wawancara 20 Juli 2020).

Tidak hanya berperan sebagai detektif keamanan desa saja, tiap penyelenggaraan pesta demokrasi desa, kalangan jagoan juga banyak dilibatkan majikannya dalam dinamika politik pemilihan kepala

desa. Sejumlah informan menjelaskan kepada peneliti bahwa kalangan jagoan memiliki majikan politiknya masing-masing. Mereka diperintahkan untuk mencari dukungan suara sebanyak-banyaknya agar calon pemimpin yang menjadi majikan para Jagoan tersebut mendapatkan peluang menang yang besar dalam kontestasi pemilu . Ditengah kondisi pedesaan yang rentan dengan maraknya tindakan pencurian, para kalangan jagoan menjalankn aktivitas politiknya, tak jarang menggunakan cara-cara intimidatif dengan menebar isu-isu keamanan. Pelibatan kalangan jagoan dengan strategi intimidatif tersebut menunjukkan bahwa lemahnya peran pihak keamanan dalam mengatasi praktek intimidasi politik yang dilakukan para Jagoan.

Intimidasi politik dalam demokrasi termasuk “dosa besar” karena mengingkari hak rakyat dalam menentukan pilihan politiknya. Elit penguasa dan parpol (partai politik) ternyata turut mendukung penggunaan peran jagoan dalam proses demokrasi. Sehingga, aparat keamanan di

Madura merasa segan apabila mereka hendak menangkap ataupun menghukum para jagoan yang melakukan intimidasi politik. Hal ini disebabkan masih kentalnya budaya sopan-santun kepada penguasanya (rato).

Setiap Pemilihan Kepala Daerah (dari Kepala Desa hingga Gubernur) dan Presiden, komunitas Jagoan ini selalu merasa senang karena disaat itulah mereka mendapatkan proyek besar. Mulai dari parpol hingga para kandidat pemimpin selalu menggunakan peran jagoan untuk mencari dukungan suara dari para rakyat. Sejumlah informan menjelaskan pengakuannya kepada peneliti bahwa para jagoan biasanya mendapatkan uang lelah sekitar 5-10 juta rupiah dari para kandidat. Bahkan, ada yang mendapatkan uang lebih dari 10 juta . Junaidi menuturkan bahwa besaran jumlah uang tersebut bergantung pada seberapa banyak suara yang dibutuhkan para kandidat dan seberapa rentan usaha mereka untuk mengamankan suara rakyat tersebut supaya benar-benar memilih sang kandidat.

Realitas peran bandit (jagoan) dalam kehidupan politik pada dasarnya susah kita abaikan keberadaannya. Tulisan yang ditulis Richard W Slatta, dosen North Carolina State University, *Bandits and Social Rural History* (1991), menggambarkan bagaimana sesungguhnya peran bandit dalam politik. Dalam komunitas masyarakat pedesaan di Amerika Latin, bandit bukanlah sebuah anomali sosial. Ia dianggap referensi, entitas, atau sistem nilai utama dalam politik. Slatta menggambarkan peran bandit tidak hanya di kalangan elite kekuasaan, tapi juga diakar rumput (terutama masyarakat pedesaan). Dalam sejarahnya, bandit telah tumbuh dalam konteks yang tidak berjarak dengan komunitas normal sosial-politik-ekonomi.

Dinamika politik local Madura juga tidak lepas dari peran-peran elit kultural kalangan jagoan di dalamnya. Secara historis, penggunaan para jagoan dalam pemerintahan di Indonesia memang sudah ada sejak era kolonialisme. Keberadaan kelompok jagoan merupakan satu-satunya alat

penguasa. Bahkan dulu seorang raja seringkali dinisbatkan pada sosok seorang jago, meskipun menjadi Raja, sebelumnya harus memiliki wahyu kedaton sebagai legitimasi. Dalam prakteknya kekuatan politik seorang penguasa tak jarang selalu diukur dari kapasitas personal melalui banyaknya jumlah pengikut yang dimilikinya sehingga sosok raja tidak lain adalah seorang superjago.

Mengamati sejarah kekuasaan dimasa lampau ini tentu memberikan gambaran empirik bahwa kekuasaan para raja dalam menegakkan kekuasaannya juga seringkali melibatkan para jago. Terlebih dalam konteks persaingan perebutan kekuasaan. Para jago sering pula disebut sebagai tukang pukul raja. Novelis berkebangsaan Belanda yang bernama Alberts mengatakan bahwa pada tahun 1710, dalam sebuah cerita pendeknya menceritakan bahwa pernah terjadi suatu peristiwa di sebuah desa di Sumenep Madura, yakni ada seorang bandit atau jagoan yang mampu mengorganisir banyak orang sebagai pengikutnya dengan tujuan untuk merebut kekuasaan raja di Sumenep. Sang bandit itu berhasil

menjebol barikade pasukan istana raja, dan dalam beberapa saat ia merebut istana dan mentasbihkan diri sebagai seorang raja. Bandit tadi mengaku masih memiliki ikatan geneologis dengan Sedyadiningrat, seorang raja Madura di masa lalu, (De Jonge, 1995).

Bila dilihat dari asal usul sosial (*sosial origin*) dengan mengacu pada sistem ekologi Madura, kemunculan komunitas jagoan diatas tentu terkait pula dengan ekosistem tegalan dengan area tanah pertanian yang tandus, gersang dan tidak produktif bagi sistem pertanian sawah. Kondisi ini diperparah pula oleh adanya curah hujan yang sangat terbatas membuat para petani Madura menghasilkan produk pertanian yang serba terbatas. Kondisi ini secara langsung menciptakan kondisi kemelaratan dan kemiskinan di kalangan warga desa. Lahan pertanian yang tidak memberikan keuntungan ekonomis disertai peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi dari tahun ke tahun menciptakan problem ekonomis yang cukup akut.

Kondisi ini tak jarang membuat orang Madura mengambil pilihan untuk migrasi sebagai solusi yang dianggap strategis guna memperbaiki masa depannya. Sekalipun pada kenyataannya migrasi bukan pula jalan satu-satunya dalam perbaikan nasib atau cara untuk dapat bertahan hidup (*survival of life*). Cara lain yang oleh sebagian anggota masyarakat dipandang sebagai cara atau jalan “hitam” adalah dengan menjadi bandit atau jagoan. Cara ini bagi anggota masyarakat untuk bertahan hidup akibat kemiskinan yang dideritanya.

Tindakan mencuri, bahkan terkadang dengan membegal (merampok) adalah gerak spontan agar dapat bertahan hidup. Bahkan jalan pintas mengatasi kemiskinan dapat dilakukan dengan menjadi bandit, preman dan sejenisnya. Meskipun pengalaman ini tidak hanya terjadi di Madura semata. Di berbagai tempat belahan dunia lainnya, seperti di Amerika Latin juga mengalami hal tidak jauh berbeda. Karakter religius Madura seolah ‘terbelah’ oleh kondisi basis

material ekologis ini. Mengapa? sebab dalam konteks sosio-ekologis ini, tidak semua orang atau komunitas di Madura 'terserap' ke dalam wacana dan ritual keagamaan yang di bawa oleh kyai sebagai agen sosial di desa seperti dalam pengamatan Kuntowijoyo, sebab struktur ekologi pertanian yang tidak produktif tersebut juga melahirkan proses sosiologis yang tidak selalu merujuk pada keberagaman yang dikembangkan oleh para kyai. Pada kenyataannya terdapat proses sosial lain yang dibangun oleh individu atau komunitas sosial Madura, yakni lahirnya eksistensi komunitas jagoan. Bila di masa awal, watak jagoan ini merupakan bentuk ekspresi spontan untuk mengatasi problem hidup akibat kondisi kemiskinan dan kemelaratan maka pada tahap perkembangan selanjutnya mengalami ideologisasi (Kuntowijoyo, 2002).

Jagoan, atau bandit dapat memberi jalan guna mengatasi kemiskinan dan beban hidup yang menghimpitnya. Apalagi tidak semua pemuda yang memiliki etos produktif dan jiwa pemberani,

menyerah dengan begitu saja dengan kondisi alam yang tandus, gersang yang menjadi penyebab kondisi kemiskinan. Dengan menjadi jagoan atau bergabung dengan komunitas jagoan bagi seorang pemuda desa, dapat membangun kehormatan diri sebagai 'sang pemberani' atau jagoan di desa yang dengan sendirinya dapat membangun hidup lebih baik dibandingkan dengan bekerja sebagai petani yang tidak memberikan penghasilan berkecukupan.

Realitas kemiskinan dan berbagai bentuk kemelaratan yang dialami oleh masyarakat Madura diatas, tidak saja karena kondisi sistem ekologis-pertanian tegalan yang tidak memberikan keuntungan ekonomis, akan tetapi juga diakibatkan karena struktur dan bangunan kekuasaan yang tidak mempedulikan kondisi perbaikan hidup masyarakat. Masyarakat Madura sejak di masa lalu mengalami eksploitasi oleh 'kekuasaan kembar', yakni para kaum aristokrat-ningrat yang menjalankan birokrasi kekuasaan dengan berkolaborasi dengan



kekuasaan Belanda yang tidak saja memeras secara ekonomi, juga fisik dan mentalitas masyarakat. Proses kapitalisasi yang berlangsung di Madura semakin memarginalisasikan penduduk desa, sebaliknya memberikan keuntungan pada pihak Belanda, kaum ningrat-aristokrat dan para pemodal, yang kebanyakan adalah warga keturunan Cina. Dalam kondisi demikian, tidak jarang muncul pencurian tanaman pangan, sapi dan komoditi lainnya yang disertai dengan kekerasan, bahkan pembunuhan.

Perilaku perbanditan, disertai dengan tindakan kekerasan bahkan pembunuhan, pencurian, perampokan dan pembakaran di Madura mulai marak saat kekuasaan kolonialisme Belanda merambah kawasan ini. Negara kolonial tentu sangat risau dengan perandai dan perilaku orang Madura ini karena dapat menguncang stabilitas keamanan dan perdagangan. Guna mengatasi perbanditan di pedesaan ini, Belanda jarang sekali menggunakan pendekatan hukum “proses pengadilan” tetapi yang paling dominan yang dilakukan di

Madura adalah dengan cara kekerasan (represif) dan pola berkolaborasi terselubung dengan para bandit itu sendiri. Menangkap bandit dengan bandit, begitulah cara yang paling sering digunakan. Selain cara ini dianggap lebih efisien juga karena negara kolonial tidak cukup mampu menkooptasi seluruh kekuatan masyarakat sampai ke akar-akarnya di pedesaan. Pola dan cara itu dianggap efektif dilakukan, disebabkan pula tidak adanya niatan dari pihak kolonialis untuk membangun institusionalisasi negara yang berorientasi pada stabilisasi keamanan untuk kemakmuran masyarakat lokal. Dalam konteks ini, kekuasaan kolonialis juga ditegakkan melalui jasa para bandit.

Disamping faktor sosio-ekologis diatas, fenomena munculnya jagoan sangat berhubungan erat dengan kondisi sosio-kultural masyarakat. Disamping faktor struktural lainnya, khususnya di dalam format negara kolonialis yang tidak mendorong adanya pelebagaan negara yang efektif dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Ketika terjadi

praktek ketidakadilan, akhirnya masyarakat menegakkan hukumnya sendiri, sekalipun dengan jalan kekerasan karena hal itu dianggap sebagai cara membela diri (*self help*). Konflik dalam bentuk tindakan carok dalam studi De Jonge terjadi dalam konteks ketiadaan peran negara dalam memberikan rasa aman dan perlindungan atas warga masyarakat Madura. Lebih lagi di masa lalu, pengalaman Madura yang selalu gagal menciptakan kerajaan yang mandiri, juga ikut andil bagaimana masyarakat mengelola sendiri sistem kekerasan tanpa melibatkan peran institusi pemerintahan (baca; kerajaan). Eksistensi kerajaan di Madura selalu berada dalam bayang-bayang dominasi kerajaan Jawa, mulai dari ekspansi kerajaan Singosari sampai Mataram (De Jonge, 1995).

Bertemunya realitas sosio-kultural masyarakat dengan struktur kekuasaan negara inilah yang saling mengakomodasi unsur-unsur premanisme yang kemudian mampu membuat entitas jagoan memiliki elastisitas atau kelenturan sehingga dapat hadir di berbagai posisi

kultural dan structural masyarakat. Hingga kini perkembangan kelompok elit jagoan tidak hanya merupakan fenomena penguasaan modal yang bersifat ekonomis sebagaimana dijelaskan diatas melainkan sudah merambah pada sector penguasaan struktural melalui proses politik dan demokrasi. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kepemimpinan kharismatik dari seorang penguasa (raja) sebagaimana dijelaskan diawal sejak masa kerajaan selalu di topang melalui pemeliharaan para jagoan untuk melanggengkan kekuasaannya. Fenomena semacam inipun masih terus berlangsung pada era reformasi saat ini. Pemilihan kepala desa sebagai wujud penyelenggaraan demokrasi lokal juga tidak bebas dari praktek pelibatan orang kuat (jagoan) dalam konstelasi politik lokal.

Realitas peran elit jagoan dan pengaruhnya terhadap perubahan social terhadap masyarakat diatas, hampir mirip pada masyarakat di tiga kecamatan (Ganding, Lenteng dan Bluto) di Kabupaten Sumenep. Pemerintahan desa sebagai sebuah institusi legal formal yang dibentuk

dalam rangka menjalankan pembangunan desa untuk kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan kepala desa diperoleh melalui mekanisme demokratis pemilihan kepala desa (Pilkades) yang diselenggarakan tiap 6 tahun sekali. Pilkades merupakan pilar penting perwujudan dan pelaksanaan demokratisasi lokal.

Pemilihan kepala desa sebagai media aspirasi politik masyarakat yang dijamin secara konstitusional dalam rangka untuk menentukan masa depan politik desa. Melalui prinsip *one man one vote* semua masyarakat berhak menentukan preferensi politiknya pada kandidat calon yang diusung dan layak untuk dipilih berdasarkan kualitas dan kapasitas serta pertimbangan-pertimbangan rasional lainnya. Dinamika politik pilkades sangat berbeda dengan dinamika pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) maupun pemilihan legislatif (pileg), jika dalam pemilukada maupun pileg dinamika politik sangat kental dengan symbol-simbol kepartaian dari berbagai kelompok partai politik, maka dalam

realitas politik desa sangat jauh dari hiruk pikuk dari symbol-simbol partai politik para kandidat yang di usung. Meski berada pada dimensi symbol yang berbeda, marketing politik pada kandidat berlangsung dengan cara yang sama melalui pesan-pesan dan media politik yang dengan konten dan isu yang berbeda. Para kandidat kepala desa lebih banyak menggunakan isu-isu keamanan disamping isu-isu perbaikan infrastruktur sebagai trending topic utama dalam menarik suara rakyat. Umumnya isu keamanan desa menjadi komoditas isu politik yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat ditengah tingginya praktek pencurian yang hampir terjadi tiap tahun.

### **Kesimpulan**

Dinamika praktek demokrasi electoral dalam berbagai level manapun tentu tidak bisa dilepaskan dari ruang kontestasi dan kompetisi yang ketat termasuk potensi hadirnya peran para bandit politik di dalamnya. Dinamika kontestasi dan premanisme dalam tubuh demokrasi menjadi fenomena yang umum pada

wilayah dimana pertumbuhan demokrasi masih belum matang dimana prinsip persamaan dan pengakuan hak-hak sipil dan politik masih belum membudaya. Meski tindakan premanisme politik dipandang sebagai upaya pemaksaan hak dan intimidasi terhadap keberlangsungan kebebasan politik masyarakat, namun dalam praktek politik praktis fenomena ini menjadi pemandangan umum.

Akar premanisme di Madura dalam sejarahnya dapat kita lihat dari realitas kemiskinan dan berbagai bentuk kemelaratan yang dialami oleh masyarakat Madura, tidak saja karena kondisi sistem ekologis-pertanian tegalan yang tidak memberikan keuntungan ekonomis, akan tetapi juga diakibatkan karena struktur dan bangunan kekuasaan yang tidak mempedulikan kondisi perbaikan hidup masyarakat. Proses kapitalisasi yang berlangsung di Madura semakin memarginalisasikan penduduk desa, sebaliknya memberikan keuntungan pada pihak Belanda, kaum ningrat-aristokrat dan para pemodal, yang kebanyakan adalah warga keturunan Cina. Dalam

kondisi demikian, tidak jarang muncul pencurian tanaman pangan, sapi dan komoditi lainnya yang disertai dengan kekerasan, bahkan pembunuhan.

Bertemunya realitas sosio-kultural masyarakat dengan struktur kekuasaan negara inilah yang saling mengakomodasi unsur-unsur premanisme yang kemudian mampu membuat entitas jagoan memiliki elastisitas atau kelenturan sehingga dapat hadir diberbagai posisi kultural dan structural masyarakat. Hingga kini perkembangan kelompok elit jagoan tidak hanya merupakan fenomena penguasaan modal yang bersifat ekonomis sebagaimana dijelaskan diatas melainkan sudah merambah pada sector penguasaan struktural melalui proses politik dan demokrasi.

#### **Daftar Pustaka**

- Arikunto. Suharsimi (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ali Mustofa Akbar, (2011). *Premanisme dalam Teori Labeling*. <http://www.erasuslim.com>.

- Bottomore, T.B, (2006). *Elit dan Masyarakat*. Jakarta: Akbar Tanjung Institute. <http://eep.saefullah.fatah.tripod.com>.
- De Jonge,H (1995). *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LkiS.
- \_\_\_\_\_ (1995). *Across Madura Strait*. Leiden: KITLV press.
- Dahl, Robert A (1956). *A Preface To Democratic Theory*. Chicago: Chicago University Press.
- Foucault, Michael (2002). *Power and Knowledge* (terj). Yogyakarta: Bentang
- Haryanto, (2005), *Kekuasaan Elite: Suatu Bahasan Pengantar*, PLOD UGM, Yogyakarta.
- Kuntowijoyo (2002). *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940*. Jakarta: Mata Bangsa.
- Laswell, Harold D. (2009) *Power and Personality*. New york : Routledge.
- Mainheim, Karl. (1992). *Ideologi dan Utopia*. Yogyakarta. Kanisius.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Neta S. Pane. (2011). *Model - Model Premanisme Modern. Presidium Indonesia Police watch*.
- Patton, MQ, (1990). *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills: SAGE.
- Rafael Raga Maran. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik..* Jakarta: Rieneka cipta.
- Rozaki, Abdur. (2003). *Menabur kharisma Menuai Kuasa*. Yogyakarta: Pustaka Marwah.
- Sidel, J. (1999), *Capital, Coercion, And Crime. Bossism in Philippines*, Stanford University Press, Stanford.
- Surbakti, Ramlan. (2003). *Memahami Politik*. Jakarta : Grasindo.
- Sulistyo, Arty Indyah. (2006). "Prinsip Dasar, Perumusan Masalah, dan Pengumpulan Data Penelitian Naturalistik". Makalah. Disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian bagi CPNS-Dosen UNY tahun 2006, pada tanggal 26-27 Desember 2006.
- Varma, SP, (2001) *Teori Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sidqi, warga desa Ganding Kecamatan Ganding, 25 Juni 2020 pukul 14.00 wiB.
- Halim, Kepala desa terpilih di desa Ganding di kecamatan Ganding, 6 Juli 2020 pukul 15.00 wiB.

Rasidi, Kepala desa terpilih di desa  
Masaran di kecamatan Bluto,  
10 Juli 2020 pukul 16.00 wib.

Harun, Kepala desa terpilih di desa  
Banaresep Temor di kecamatan  
Lenteng, 20 Juli 2020 pukul  
10.00 wib